

KARAKTERISTIK JURNALISME JEPANG PASCAPENDUDUKAN (1952 - 1980)

SKRIPSI SARJANA

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan
mencapai gelar Sarjana Sastra**



oleh

EVI SRI HASTUTI

Jurusan Sastra Jepang

NIM. 00110051

**FAKULTAS SAstra
UNIVERSITAS DARMA PERSADA
JAKARTA
2004**

Skripsi Sarjana yang berjudul:

KARAKTERISTIK JURNALISME JEPANG

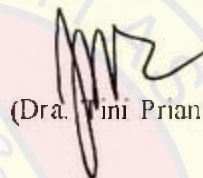
PASCAPENDUDUKAN (1952 – 1980)

Telah diuji dan diterima baik (lulus) pada tanggal 8 bulan Juli Tahun 2004 di hadapan Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Sastra.

Pembimbing


(Irwan Djamaluddin, ~~SS~~)

Ketua Panitia/Penguji



(Dra. Nini Priantini)

Penguji



(Dra. Yuliasih Ibrahim)

Panitera



(Nani Dewi Sunengsih, SS)

Disahkan oleh:

**Ketua Jurusan
Bahasa dan Sastra Jepang**



(Dra. Yuliasih Ibrahim)

Dekan Fakultas Sastra

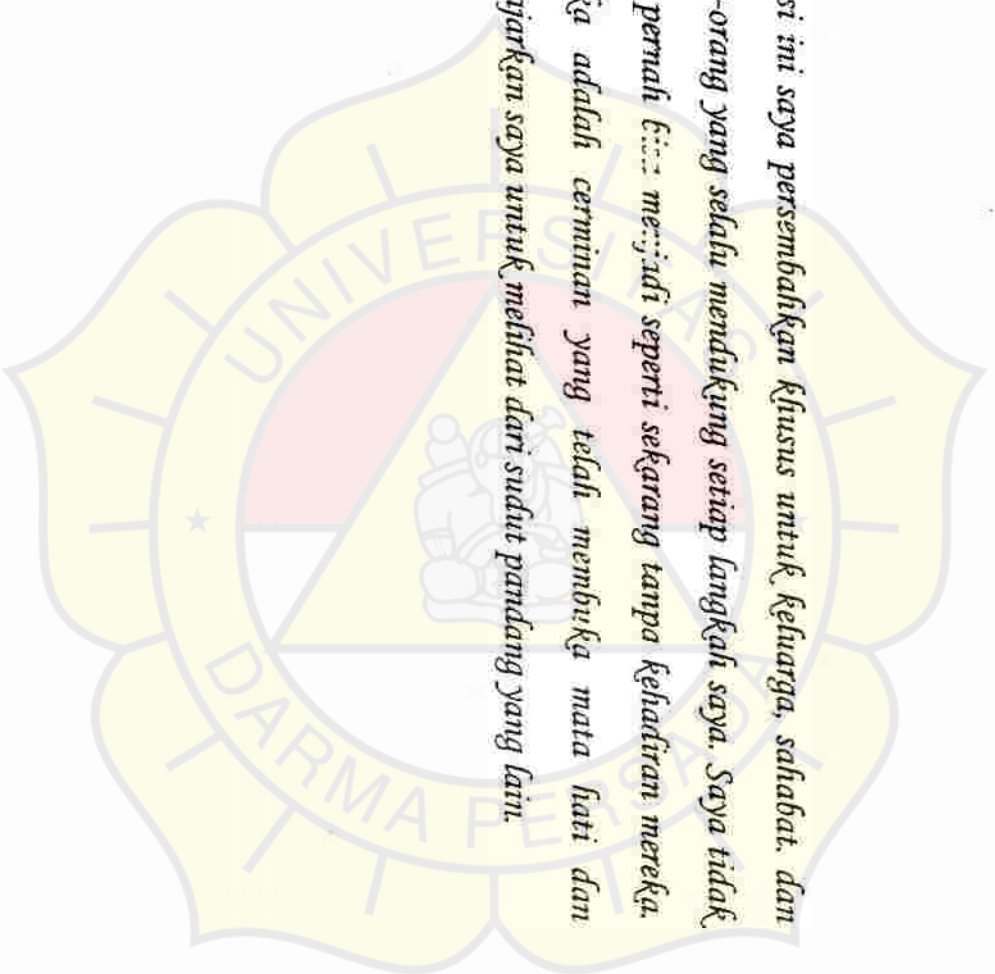


FAKULTAS SASTRA

(Dra. Inny C. Haryono, M.A.)

Halaman Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan khusus untuk keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu mendukung setiap langkah saya. Saya tidak akan pernah bisa menjadi seperti sekarang tanpa keuletan mereka. Mereka adalah cerminan yang telah membuka mata hati dan mengajarkan saya untuk melihat dari sudut pandang yang lain.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara material maupun spiritual. Karenanya dalam kesempatan ini penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Bapak Irwan Djamaluddin, M.A., yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dra. Yuliasih Ibrahim, selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jepang sekaligus sebagai Dosen Pembaca.
3. Ibu Dra. Tini Priantini, selaku Ketua Sidang.
4. Ibu Nani Dewi Sunengsih, S.S., selaku Sekretaris Penguji.
5. Ibu Dra. Hj. Iany C. Haryono, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sastra.
6. Ibu Dra. Purwani P., selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dedy Puryadi, selaku dosen Bahasa Indonesia yang bersedia membantu proses pengeditan.
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Sastra Jurusan Sastra Jepang, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
9. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Darma Persada, The Japan Foundation, dan Universitas Indonesia yang telah membantu penulis

- mendapatkan bahan-bahan referensi yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini.
- 10 Keluarga tercinta, Papa dan Mama, yang selalu memberikan dukungan dan doa di dalam setiap langkah penulis, kaka yang super-super cuek dan Aldy, adik tersayang yang kehadirannya selalu memberikan penulis semangat dan energi yang seakan-akan tidak akan pernah habis, You are my strength.
 - 11 Sahabat-sahabat sehati dan seperjuangan, Kachan yang selalu mendampingi di saat duka dan suka, Ena yang selalu menjaga dan mengingatkan, Teesa, Deasy, Ija, Ryoko, Lilis, dan Eq yang telah memberikan warna dan nuansa baru, terus bersahabat sampai ke surga, "thanks a lot for the unconditional love".
 - 12 Teman-teman angkatan '00 khususnya Kelas B, Fandi, Winston, Harfan, Yadi, Kardi, Yuni, Endang, Juli, Tenno beserta gangsternya, dll.
 - 13 Akhwatillah di SKMI Keputrian, Wuri, Lila, Anti, Maya, Devi, Teni, Lissa, Meita, dll, "Keep on Istiqomah my sisters, syukron atas semuanya".
 - 14 Ikhwanillah di SKMI, akh Irchan, Qodir, Feri, Aji, Raden, dll, terima kasih atas kerjasama dan ilmunya.
 - 15 Rekan-rekan SU, Sella, Ai, Ijul, Iyee, Mami, Adie, Cucun, Tya, dll. "Terus berjuang, jangan menyerah!!!".
 - 16 Juga pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 28 Juni 2004

Evi Sri Hastuti



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	vi	
BABI	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Permasalahan	8
	1.3 Tujuan Penulisan	8
	1.4 Ruang Lingkup	9
	1.5 Metode Penulisan	9
	1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II	SEJARAH AWAL JURNALISME JEPANG.	
	PENCARIAN KARAKTERISTIK	11
	2.1 Zaman Edo (1603 – 1867)	11
	2.2 Awal Zaman Meiji (1868 – 1889)	17
	2.3 Karakter Umum dan Sembilan Prinsip	
	Dasar Jurnalisme	25
BAB III	KARAKTERISTIK JURNALISME JEPANG	
	PASCA PENDUDUKAN (1952 – 1980)	30
	3.1 Beretika	30

3.2	Peminat yang Berkonsentrasi Tinggi	33
3.2.1	Media Cetak	33
3.2.2	Media Elektronik	35
3.3	Berpartisipasi dalam Proses Pengambilan Keputusan	38
3.4	Pemonopolian Berita oleh Kissha Kurabu	40
3.4.1	Pemberitaan yang Seragam	42
3.4.2	Ban Kissha	44
3.4.3	Jurnalis Freelance	46
3.5	Jurnalis-jurnalis yang Kompeten	46
BAB IV	KESIMPULAN	50
GLOSARI	52
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Perang Dunia ke II Jepang, satu-satunya negara Asia yang terlibat, mengalami kekalahan sehingga pada tanggal 2 September 1945 harus menandatangani surat penyerahan kepada negara-negara sekutu dan sejak saat itu pemerintahan diambil alih oleh negara-negara sekutu. Selama masa pendudukan, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Jepang merupakan campur tangan pihak SCAP (*supreme commander for the allied powers*) komando tertinggi negara sekutu. Kehadiran mereka, khususnya tentara Amerika Serikat yang datang dibawah pimpinan Jenderal Douglas Mac Arthur, adalah untuk mengubah Jepang yang saat itu menggunakan sistem militer menjadi negara demokrasi modern. Selama enam tahun ke depan, Jenderal Mac Arthur melalui SCAP menuntun masyarakat Jepang menuju era reformasi.

Hal yang menjadi perhatian utama untuk segera direformasi SCAP adalah mengenai hak-hak dan kebebasan individu masyarakat Jepang. Pemerintahan Jepang kala itu sangat mengekang hak-hak individual dan kebebasan seperti penganutan agama, status wanita dalam masyarakat, dan kebebasan pers.

Di awal pendudukan negara-negara sekutu mengadakan sebuah pertemuan (Konferensi Postdam) yang membahas bentuk pendudukan apa yang akan diterapkan. Untuk itu, SCAP memiliki hak untuk mengeluarkan kebijakan

melalui pemerintah Jepang. Konferensi ini mendukung adanya pelaksanaan sistem demokrasi di Jepang karena dalam deklarasi Konferensi Postdam paragraf 10, dinyatakan bahwa pemerintah Jepang diharuskan meniadakan semua hambatan terhadap kebangkitan kecenderungan berdemokrasi di antara masyarakat Jepang dan memberikan kebebasan dalam berbicara, beragama, dan berpendapat sebagai hak-hak fundamental manusia¹

Untuk memperkuat apa yang telah digariskan dalam Deklarasi Postdam, SCAP pada tanggal 27 September 1945 mengeluarkan sebuah memorandum yang mewajibkan Pemerintah Jepang untuk menghapus segala jenis penekanan terhadap pers, penerbitan, dan industri perfilman.

Berkas SCAP kebebasan berekspresi akhirnya dilegitimasi dalam Konstitusi Jepang. Pada tanggal 3 November 1946 dibuat konstitusi baru untuk menggantikan Konstitusi Meiji yang tidak memuat tentang hak-hak individual. Dalam pasal 21 konstitusi yang baru disebutkan bahwa :

*"Freedom of assembly as well as speech, press, and all other forms of expression are guaranteed. (2) No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of communication be violated."*²

"Pemerintah menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, pers, dan segala bentuk ekspresi lainnya. (2) Tidak akan ada lagi penyensoran dan pelanggaran terhadap kerahasiaan sarana komunikasi apapun"

¹ William De lange, *A History of Japanese Journalism* (Japan: Japan Library, 1998), hlm. 167

² *Ibid.*, hlm. 174.

Tanggal 28 April 1952, akhir dari pendudukan negara-negara sekutu, Jepang kembali menjadi negara yang benar-benar merdeka dengan berlandaskan demokrasi.

Bill Kovach, seorang pakar jurnalisme dan Ketua *Committee of Concerned Journalist*, mengatakan bahwa jurnalisme dan demokrasi tumbuh bersama-sama. Ia lahir dan runtuh bersama-sama. Demokrasi tidak akan eksis tanpa jurnalisme. Jurnalisme yang menjadi propaganda negara akan meracuni demokrasi. Jurnalisme mesti menyajikan fakta-fakta dan informasi independen tentang peristiwa dan isu-isu yang akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam membuat keputusan.³

Seiring dengan reformasi kebebasan yang masih berlangsung, Jepang memulai babak baru kehidupan berdemokrasi. Media massa kini lebih bebas dan mandiri dalam menyajikan berita tanpa khawatir akan ada tekanan dari pemerintah. Peranan mereka dalam pembentukan opini publik sangat vital karena Jepang memiliki struktur masyarakat yang berkompartmentasi secara tertutup. Setiap individu memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas kelompoknya tidak seperti masyarakat di negara-negara benua Eropa ataupun Amerika Serikat yang struktur masyarakatnya individualistis, yang hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Masyarakat Jepang sangat menyukai kegiatan yang dilakukan secara berkelompok, mulai dari kegiatan sederhana seperti rutinitas sehari-hari sampai kegiatan yang rumit seperti bisnis dan politik. Seseorang merupakan bagian dari kelompok untuk pertama dan selamanya. Sejak lahir mereka sudah menjadi

³ Diskusi dan peluncuran buku terjemahan *Sembilan Elemen Jurnalisme* karya Bill Kovach dan Tom Rosentiel tanggal 10 Desember 2003. Artikel dalam *Kompas* (Jakarta), 11 Desember 2003.

anggota kelompok terkecil, yaitu keluarga. Di dalam kelompok ini mereka akan belajar mengenai aturan-aturan dasar dalam berkelompok seperti kesetiaan, perbedaan yang jelas antara *uchi* dan *soto* (*uchi* berarti 'rumah' dan *soto* berarti 'luar'. Jadi, *uchi* dan *soto* berarti 'apa yang ada di dalam dan di luar kelompok'), dan hirarki vertikal (susunan kepangkatan atasan dan bawahan dalam kelompok). Ketika beranjak dewasa, mereka akan menerapkan pelajaran-pelajaran ini di dalam kelompok-kelompok lain yang akan mereka ikuti seperti sekolah, klub-klub olah raga, bisnis, politik, dan agama. Identitas seseorang dapat terlihat dari kelompok yang diikutinya. Apabila berpindah-pindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain, itu menunjukkan bahwa ia mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan kelompoknya. Loyalitas anggota terhadap kelompoknya berlangsung untuk seumur hidup.

Di dalam masyarakat Jepang kelompok-kelompok ini dikenal dengan istilah *ie*. menurut Aruga Kisemon dalam bukunya,

「家は日本に特殊な慣行であり、
 補文化意味の家方とちがう
 家は家業や家業の運営集団と
 あって、この意味で社会における
 生活の単位として存在していた
 から、それは成員の生死を連
 言することを目標とした。」⁴

⁴Aruga Kisemon, "ie", *ie to Mura no Shakaigaku*, eds. Torigoe Hiroyuki, (Tokyo, 1988), hlm 9.

"*Ie* adalah kebiasaan khas yang ada di Jepang yang berbeda dengan *kazoku* dalam arti budaya yang *kazim*. *Ie* merupakan kelompok yang menjalankan usaha dan kekayaan keluarga, yang dalam hal ini sebagai satuan kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada eksistensi atau keberadaannya yang melampaui hidup atau mati sebagai sasaran kesinambungan."

Oleh karena itu, *Ie* tidak hanya berupa keluarga, tetapi juga dapat berupa satuan atau kelompok kerja sama dalam mengelola usaha. *Ie* juga bisa dikatakan sebagai organisasi ekonomi atau sebagai suatu kelompok kerja sama. *Ie* bukan hanya mencakup fungsi kehidupan ekonomi, tetapi lebih beragam bidang, yaitu dapat meliputi kehidupan rumah tangga, politik, dan keagamaan dari setiap anggotanya. Aturan-aturan bagaimana seharusnya seorang anggota berperilaku juga terdapat dalam *Ie*⁵. Kelompok-kelompok ini pada umumnya saling tertutup sehingga mereka hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai apa yang terjadi di luar kelompok mereka dan bahkan tidak ingin orang luar tahu apa yang terjadi di dalam kelompok mereka.

Meskipun saling berkelompok secara tertutup, masyarakat Jepang merupakan masyarakat yang aktif dan antusias dalam menerima informasi. Hal ini terlihat dengan jelas sejak Jepang masih melaksanakan Politik *Sakoku* (isolasi), tepatnya pada Zaman Edo ketika Kaisar Tokugawa tidak mengizinkan orang-orang asing memasuki wilayahnya kecuali bangsa Belanda dan Cina yang diperbolehkan melakukan perdagangan di pelabuhan Nagasaki. Dari kedua bangsa asing yang diizinkan masuk ke Jepang, kaisar menganggap bahwa hanya bangsa

⁵Akitoshi Shimizu, *Ie and Dozoku, Family Decent in Japan Current Anthropology*, vol 4 (New York: Johnson Reprint Corporation, 1987), hlm 85.

Belanda yang dapat diandalkan untuk memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di luar Jepang, karena jika dibandingkan dengan bangsa Cina, bangsa Belanda pada umumnya lebih tahu mengenai aktivitas yang dilakukan oleh negara barat di daerah Pasifik. Oleh karena itu, kaisar meminta kepada bangsa Belanda untuk memberitahukan mengenai apa yang terjadi, terutama mengenai sepak terjang pendeta-pendeta Iberian dari Portugis yang diusir dari Jepang karena menyebarkan agama Kristen.

"If you desire to continue trade with Japan, you are required, upon every arrival of one of your ships, to inform us about that which might have come to your knowledge of any undertaking of the Portuguese against our country. We also expect to hear from you wheiher the Portuguese continue their custom of dominating alien countries and spreading the christian religion. Furthermore, whatever comes to your knowledge in whatever country you trade to, we expect you should notify to our magistrate in Nagasaki."⁶

" Jika kalian ingin terus berdagang dengan Jepang, setiap kapal yang datang diwajibkan memberi informasi apapun yang diketahui tentang apa yang telah dilakukan bangsa Portugis terhadap kami. Kami juga mengharapkan akan terus mendengar dari kalian, apakah bangsa Portugis melanjutkan kebiasaan mereka mendominasi negara sekutu dan menyebarkan agama kristen. Lebih lanjut lagi, apapun yang kalian ketahui, di negara manapun, kami harap kalian memberitahukannya kepada pejabat kami di Nagasaki."

Untuk memuaskan keingintahuan kaisar pada tahun 1644 bangsa Belanda mulai mengumpulkan laporan tahunan mengenai apapun yang sedang terjadi di

⁶ De Loffeljcke Compaignie dalam William De Lange, *A history of Japanese Journalism* (Japan: Japan Library, 1998), hlm 6

dunia. Kumpulan laporan ini disebut *Oranda Fuusetsugaki* (buku kabar angin Belanda) yang isinya sebagian besar mengenai aktivitas terbaru bangsa Spanyol dan Portugis di daerah Pasifik.

Apa yang dilakukan oleh bangsa Belanda, yaitu mencari, mengumpulkan, dan memberikan informasi merupakan sebuah proses yang dinamakan jurnalisme tradisional. Menurut Edwin Emery pengertian jurnalisme secara tradisional adalah pengumpulan, penulisan, pengeditan, dan penerbitan berita atau pendapat mengenai berita di surat kabar atau terbitan berkala. Namun, cakupan jurnalisme telah meluas tidak hanya melalui media cetak, tetapi juga melalui media-media terbaru yang cukup populer di kalangan masyarakat seperti radio dan televisi yang lazim disebut jurnalisme elektronik.⁷ Dalam sejarah jurnalisme Jepang, bangsa Belanda merupakan bagian terpenting dari lahirnya jurnalisme modern.

Antusiasme masyarakat dalam menerima dan mencari informasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan. Tingginya tingkat pengonsumsi dan permintaan akan pelayanan informasi mengindikasikan bahwa masyarakat Jepang merupakan masyarakat informasi. Jadi, meskipun tertutup pada dasarnya mereka ingin mengetahui perkembangan yang terjadi di luar kelompok.

Melalui media massa masyarakat umum dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam bidang politik, bisnis, atau birokrasi. Begitu pula cara pemimpin mengetahui apa yang mungkin dipikirkan oleh rakyatnya adalah dengan mengikuti media massa. Dengan kata lain, media massa merupakan perekat bangsa Jepang dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi.

⁷ Edwin Emery, "Journalism", *The Macmillan Family Encyclopedia* (London: Macmillan London Ltd, 1980), 11, hlm 453-454.

Reformasi kebebasan berekspresi, struktur masyarakat yang berkelompok secara tertutup, masyarakat yang antusias dalam menerima informasi membentuk karakteristik jurnalisme Jepang pascapendudukan sedemikian rupa sehingga menjadi beretika, memiliki peminat yang terkonsentrasi tinggi, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki klub pers yang memonopoli berita, dan jurnalis-jurnalis yang kompeten.

1.2 Permasalahan

Adanya reformasi kebebasan selama masa pendudukan, struktur masyarakat yang saling berkelompok secara tertutup namun sangat antusias dalam menerima informasi telah membentuk karakteristik jurnalisme tersendiri di Jepang. Dalam skripsi ini penulis akan membahas bagaimana perkembangan dan kondisi serta karakteristik jurnalisme di Jepang pascapendudukan.

1.3 Tujuan Penulisan

Dengan meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan jurnalisme Jepang diharapkan pembaca dapat mengetahui tentang karakteristik jurnalisme Jepang pascapendudukan negara-negara sekutu.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dapat dimengerti sebagai batasan dengan maksud agar topik yang dibicarakan tidak menyimpang dan dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Oleh karena itu, penulis membatasi penulisan ini sesuai dengan

permasalahan, yaitu karakteristik yang dimiliki jurnalisme Jepang pasca-pendudukan (1952-1980), berkat reformasi terhadap kebebasan pers yang dilakukan oleh Jendral Douglas Mac Arthur.

1.5 Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif, yaitu berdasarkan pada penelitian kepustakaan melalui pengumpulan data dari buku-buku dan koran yang ada di perpustakaan Universitas Darma Persada, Universitas Indonesia, Pusat Kebudayaan Jepang, dan internet.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi beberapa bab, antara lain :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Sejarah Awal Jurnalisme Jepang: Pencarian Karakteristik

Bab ini berisi tentang bagaimana jurnalisme lahir dan berkembang untuk mencari karakteristik di Zaman Edo dan awal Meiji yang sesuai dengan keadaan masyarakat mereka, serta

karakter umum dan sembilan prinsip dasar jurnalisme menurut Bill Kovach, seorang pakar jurnalisme dan ketua *Committe of Concerned Journalist*.

Bab III : Karakteristik Jurnalisme Jepang Pasca-Pendudukan (1952 - 1980)

Bab ini menjelaskan karakteristik yang dimiliki oleh jurnalisme Jepang setelah pendudukan oleh negara sekutu.

Bab IV : Kesimpulan

Bab ini berisikan kesimpulan dan keseluruhan isi skripsi ini.

